

# Bawaslu Untuk Demokrasi Substansi

Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan lembaga independen yang memiliki mandat penting dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia. Sebagai Badan Pengawas pemilu, Bawaslu tidak hanya bertugas mengawasi, tetapi juga mencegah, menindak, serta menyelesaikan sengketa proses pemilu. Agar mampu menjalankan perannya secara optimal, penguatan kelembagaan Bawaslu menjadi kebutuhan mendesak dan strategis dan lebih penting adalah bagaimana lembaga bawaslu mampu hadir ditengah masyarakat untuk menjawab semua pertanyaan masyarakat selama ini tentang kerja-kerja lembaga bawaslu melalui sosialisasi serta penguatan literasi masyarakat akan pentingnya kehadiran lembaga Bawaslu dalam mewujudkan demokrasi yang substansial.

Untuk lebih mewujudkan eksistensi Bawaslu dan meningkatkan kepercayaan publik maka ada beberapa hal sebaiknya di tingkatkan diantaranya adalah :

Pertama, **Aspek Regulasi** perlu adanya harmonisasi regulasi yang lebih jelas dan tegas terkait kewenangan Bawaslu, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dengan lembaga lain. Aturan yang kuat akan memberikan landasan hukum yang kokoh bagi Bawaslu dalam mengambil keputusan.

Kedua, **Aspek Sumber Daya Manusia** kualitas pengawas pemilu, harus terus ditingkatkan melalui pendidikan, pelatihan, serta penguatan kapasitas berbasis teknologi informasi. SDM yang



Oleh  
Darwis Tahang, SH., MH., MM  
Penggiat Pemilu

profesional, berintegritas, dan memahami perkembangan politik menjadi modal utama.

Ketiga, **Aspek Infrastruktur dan Teknologi** di era digital, pengawasan pemilu tidak bisa hanya mengandalkan cara-cara manual. Bawaslu perlu memperkuat pengawasan berbasis teknologi, seperti aplikasi pelaporan cepat, big data untuk memetakan potensi pelanggaran, hingga penggunaan AI dalam mendekripsi disinformasi.

Keempat, **Aspek Partisipasi Publik**, demokrasi tidak hanya milik penyelenggara pemilu, melainkan juga masyarakat luas. Oleh karena itu, penguatan Bawaslu harus diiringi dengan strategi partisipatif, di mana

masyarakat dilibatkan aktif dalam mengawasi jalannya pemilu melalui edukasi politik dan kanal pengaduan yang mudah diakses.

Kelima, **Aspek Independensi dan Integritas** lembaga pengawas pemilu harus bebas dari intervensi politik. Independensi Bawaslu menjadi kunci agar setiap keputusan dan tindakan pengawasan diterima sebagai upaya menjaga keadilan, bukan sebagai keberpihakan.

Dengan penguatan diberbagai aspek tersebut, Bawaslu akan semakin kokoh dalam mewujudkan demokrasi yang substansi. Pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas akan menghasilkan kepemimpinan yang legitimate serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem politik Indonesia yang tentu juga meningkatkan tingkat kepercayaan pada penyelenggara.